

Perjalanan DPRD Kalbar

Jadi Temuan BPK

PONTIANAK. Berbagai persoalan muncul di internal DPRD Kalbar. Kini sebanyak 11 anggota DPRD Kalbar kembali berulah. Perjalanan dinas mereka menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, atas pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah dan dokumen lain terkait, bahwa terdapat pembayaran perjalanan dinas itu tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar puluhan juta rupiah.

Terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang sama, pada waktu yang bersamaan dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya sebesar Rp 27.300.000.

Diketahui terdapat perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan empat orang anggota DPRD yang bersamaan waktunya dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya.

Kemudian, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang dalam TA 2010 sebesar Rp 48.600.000.

Selain itu terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersa-

maan dengan pelaksanaan kegiatan Reses TA 2010 sebesar Rp 7.100.000.

Sehingga hal itu mengakibatkan adanya realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kalbar berindikasi merugikan daerah Rp 83.000.000 (Rp 27.000.000 + Rp 48.600.000 + Rp 7.100.000) yang disebabkan, Sekretaris DPRD Kalbar selaku pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan. Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Sekretariat DPRD Kalbar dalam memverifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalbar agar memberikan sanksi sesuai ketentuan, kepada Sekretaris DPRD yang tidak mematuhi ketentuan, terkait pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD. Serta memberikan sanksi kepada PPK Sekretariat DPRD yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi pertanggungjawaban realisasi belanja sesuai ketentuan.

BPK juga memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis TP/TGR Kalbar untuk

memproses penetapan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 91.200.000.

Kemudian memerintahkan Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran untuk melakukan perbaikan atas ketidrapatuhan supaya pada masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti SE dikonfirmasi menjelaskan, kelebihan uang perjalanan dewan dikarenakan lemahnya administrasi di Sekretariat DPRD Kalbar. "Pada 23 Juli ada undangan pameran pariwisata 24-25-26. Tapi karena cap dinas, audit BPK diminta mengembalikannya," katanya.

Legislator Partai Demokrat ini menegaskan, kalau ada yang salah dalam pembukuan di Sekretariat DPRD, kemudian subyeknya disetor kembali, maka belum tentu kesalahan Dewan. Dirinya menyarankan agar SDM di sekretariat DPRD lebih dititikberatkan lagi.

Khususnya SDM administrasi negara. Apabila mereka tak berhati-hati menjalankan tugas dan fungsi mereka, maka dapat merusak nama baik anggota DPRD.

"Hak saya benar. Perjalanan dinas terperiksanya kalau pelanggaran administrasi ada yang dianggap merugikan negara dan yang berindikasi hukum," tegas Ary. (jul)

BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD KALBAR

Perjalanan Dinas Ganda

Nama	Tujuan	Berangkat	Kelebihan Pembayaran (Rp)
Nicodemus R Toun	Jakarta	14 Januari 2010	6.000.000
Sy Umar Alkadrie	Mataram	29 November 2010	2.200.000
Sy Umar Alkadrie	Jakarta	1 Desember 2010	3.800.000
Alifudin	Jakarta	29 Oktober 2010	7.100.000
Prabasa Anantatur	Jakarta	1 Desember 2010	8.200.000
Jumlah	27.300.000		

Perjalanan Dinas Bersamaan Jadwal Sidang

Nama	Tujuan	Berangkat	Kelebihan Pembayaran (Rp)
Minsen	Jakarta	18 Maret 2010	6.000.000
Minsen	Jakarta	18 Maret 2010	6.000.000
Gusti Effendi	Jakarta	29 Juli 2010	7.100.000
Tapanus	Jakarta	29 Juli 2010	7.100.000
Thomas Aleksander	Jakarta	29 Juli 2010	7.100.000
Syafriani	Jakarta	8 Agustus 2010	7.100.000
Bachwi	Jakarta	27 November 2010	8.200.000
Jumlah	48.600.000		

Perjalanan Dinas Bersamaan Jadwal Reses

Nama	Tujuan	Berangkat	Kelebihan Pembayaran (Rp)
Aty Pudyanti	Jakarta	23 Juli 2010	7.100.000
Jumlah	7.100.000		